



P2KPK
Universitas
Maritim
Raja Ali Haji

Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan



P2KPK Universitas
Maritim Raja Ali
Haji 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ijin dan rahmat-Nya maka *company profile* Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji ini dapat tersusun. P2KPK UMRAH merupakan organ yang ada di UMRAH dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat.

P2KPK UMRAH merupakan pusat penelitian yang berusaha mencari terobosan-terobosan baru dalam upaya menemukan berbagai inovasi terkait dengan kebijakan pemerintah serta mencari solusi berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Melalui wadah ini juga P2KPK memfasilitasi civitas akademika UMRAH untuk lebih banyak berkiprah bagi kemajuan bangsa dan daerah.

Telah banyak yang dilakukan oleh P2KPK UMRAH selama berdiri sejak tahun 2011 hingga saat ini dalam upaya mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan dunia usaha pada umumnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberi kesempatan kepada Peneliti yang terabung dalam P2KPK UMRAH tak lupa kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan harapan semoga sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat Sipil dan Dunia Pendidikan dapat terus ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.

Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan
Kemasyarakatan Universitas Maritim
Raja Ali Haji,

A.SURADJI MUHAMMAD, S.Sos, M.Si
Ketua

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	3
1. Maksud.....	3
2. Tujuan:	4
C. Landasan Yuridis	4
D. Bentuk-bentuk Kegiatan	5
E. Ruang Lingkup	5
F. Tim Peneliti.....	6
G. Alamat dan Rekening.....	7

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi Era Globalisasi di Abad XXI atau sering disebut sebagai Millenium ke – III, kita dihadapkan kepada tantangan dan bahaya ancaman yang berat dalam kita melakukan berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Untuk menghadapi tantangan dan bahaya ancaman tersebut sesungguhnya terbuka kesempatan dan peluang untuk bersaing dengan negara–negara bangsa yang lain yang lebih maju di dunia. Indonesia tidak bisa menghindari dari tantangan dan ancaman tersebut. Walaupun Indonesia merupakan negara yang besar dan cukup potensial, masalah – masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam hubungan perdagangan antar Bangsa, tetap masih merupakan tantangan terhadap berbagai pengaruh negatif, di samping kesempatan dan momentum yang harus dimanfaatkan guna meraih berbagai keuntungan dalam era persaingan dunia. Seperti berulang kali dikatakan antara lain oleh Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia pada suatu saat pasti akan dilanda oleh pengaruh Era Globalisasi dan Perdagangan bebas yang penuh tantangan dan persaingan. Untuk menghadapinya bangsa Indonesia bukan hanya dituntut memiliki sikap mental, ketahanan nasional, dan integritas yang tinggi terhadap negara dan bangsa, melainkan perlu memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna membangun bangsa dan masyarakat Indonesia.

Dokumen PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) sebagai landasan pembangunan bangsa telah menegaskan betapa pentingnya peranan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan sangat mempengaruhi pembangunan nasional. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi keberhasilan masyarakat maju dan mandiri. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar pemanfaatan, pengembangan dan penguasaannya dapat mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa, mempercepat proses pembaharuan,

meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas, hasrat dan martabat bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu dan tangguh menghadapi berbagai tuntutan masyarakat dan permasalahan yang semakin kompleks. Tidak dapat disangkal, bahwa di samping keberhasilan yang telah dicapai masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang belum sepenuhnya mencerminkan terwujudnya ketangguhan pemerintahan yang kuat, berwibawa, bersih, dan bertanggung jawab sebagaimana dicita – citakan, terutama dalam menghadapi perkembangan dan tantangan jaman. Konstataasi kelemahan ini, bisa terlihat baik ditinjau dari segi bentuk dan sistem pemerintahan, struktur organisasi dan manajemen pemerintahan, maupun dari segi pengembangan sumber daya manusia aparatur yang memiliki profesionalisme, serta sikap dan perilaku aparatur pemerintah yang berperan dan berkedudukan sebagai abdi negara dan masyarakat.

Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur negara aparat negara lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Selain itu, perlu diupayakan penataan kewenangan yang rasional diantara jajaran dan peringatan aparatur negara sehingga terlaksana penyelenggaraan administrasi negara yang bersih, berwibawa, profesional, efisien, dan efektif.

Untuk pengembangan hasil-hasil penelitian, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai satu-satunya Universitas Negeri di Kepulauan Riau, maka

UMRAH telah memperoleh berbagai kepercayaan dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pemikiran dan perkembangan kekinian, serta terpanggil untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan ide-ide penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), P2KPK UMRAH telah berupaya melakukan berbagai penelitian yang memfokuskan kepada peningkatan peranan dan kegiatan PT dalam pengabdian masyarakat. Dilatarbelakangi berbagai pertimbangan tersebut, maka Rektor UMRAH telah melakukan modifikasi dalam kebijakan sehingga terbentuklah suatu lembaga yang diberi nama “**Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji**” atau disingkat “**P2KPK UMRAH**”

P2KP UMRAH merupakan bagian integral dari program Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Sasaran yang menjadi pusat perhatian P2KPK ini lebih dititik beratkan kepada lembaga–lembaga Pemerintahan, dengan membuka kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga/badan/instansi pemerintah, baik yang ada di Pusat maupun didaerah, badan – badan penelitian dan perguruan tinggi, dan tidak tertutup kemungkinan untuk kerjasama dengan lembaga–lembaga luar negeri, sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dalam upaya lebih memfokuskan kepada pengembangan pengabdian kepada masyarakat, maka dibentuklah lembaga Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan pada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dimaksudkan untuk ikut serta dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan

bangsa, serta membantu mengembangkan kemampuan kelembagaan pemerintahan (*institutional capacity building*) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sebagaimana dicita-citakan. Suatu pemerintahan yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat.

2. Tujuan

- 1) Membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- 2) Membantu pemerintah dalam upaya pengembangan (*reform*) bentuk dan sistem birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan perangkat birokrasi yang professional, kuat, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, serta memiliki pengabdian (dedikasi), kejujuran, disiplin dan berbudi pekerti yang luhur;
- 3) Membantu pemerintah dalam pengembangan berbagai alternatif pemecahan masalah penyelenggaraan pemerintahan.

C. Landasan Yuridis

Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan atau P2KPK dibentuk berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, dan UUD – 1945 sebagai landasan konstitusional. Sedangkan untuk landasan operasionalnya adalah peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berlaku.

Dasar hukum pembentukan Pusat Kajian Kebijakan Publik ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji 33.A tahun 2011 tentang pembentukan Pusat kajian Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH tertanggal 30 April 2011.

Pada tahun 2015 selanjutnya dikukuhkan melalui SK Rektor No. 131/DT.01/2015 tentang Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

D. Bentuk-bentuk Kegiatan

Dalam melaksanakan fungsinya, Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk – bentuk sebagai berikut :

1. Konsultasi;
2. Legal Drafting;
3. Penelitian dan Pengembangan;
4. Pendidikan dan Pelatihan;
5. Seminar dan Lokakarya;
6. sMembantu Pengembangan Manajemen Pemerintahan tingkat Pusat dan Daerah.
7. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan (Pusat / Daerah)
8. Penerbitan / Publikasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembedaan yang termasuk kedalam bentuk – bentuk kegiatan Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan pada dasarnya mengacu kepada konsentrasi bidang keilmuan yang ada dilingkungan UMRAH sebagai ilmu terapan (*applied science*). Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan juga menyiapkan program penunjangnya yang diselenggarakan secara mandiri dan atau secara bersama dengan pihak terkait, seperti Bidang Hukum/Legislati; Bidang Lingkungan; Bidang Studi Kewilayahan; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Bidang Etika Pemerintahan; dan Hak – Hak Azazi Manusia (HAM), berbagai masukan mengenai kebijaksanaan pembangunan, dan lain – lain.

Karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program P2KPK tercermin dalam pembedangan yang termasuk ruang lingkup kebijakan-kebijakan publik, yaitu meliputi berbagai Bidang Studi sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Umum;
2. Bidang Keuangan Pusat dan Daerah
3. Bidang Pembangunan Daerah;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Bidang Pengembangan Wilayah;
6. Bidang Manajemen Pemerintahan
7. Bidang Kebijakan Publik.

F. Tim Peneliti

Tim peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan UMRAH terdiri dari peneliti yang ekspert dibidangnya yang terkelompok menjadi Peneliti tetap dan Peneliti Tidak Tetap.

1. Peneliti Tetap

No	Nama	Keahlian
1	A.Suradji Muhammad, M.Si	Politik
2	Edison, SPA, MPA	Administrasi
3	Alfiandri, S.Sos, M.Si	Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Dr.Oksep Adhayanto, SH,MH	Hukum dan Kemasyarakatan
5	Jamhur Poti, M.Si	Komunikasi dan Kebijakan Publik
6	Afrizal, M.Si	Pemerintahan, Ketahanan Nasional

2. Peneliti Tidak Tetap

No	Nama	Keahlian
1	Imam Yudhi P. MPA	Pemerintahan Daerah
2	Irman, SH, MH.	Hukum
3	Rudi Subiyakto, M.Si	Politik Lokal
4	Bismar Aryanto, M.Si	Manajemen PEMDA

5	Winata Wira, SE, M.Ec	Ekonomi
6	Jack Febriand Adel, SE, MSi, Akt	Akutansi
7	Eka Suswaini, ST, MT	Teknik Industri
8	Dr. Abdul Malik	Budaya

G. Alamat Kantor

Pusat Kajian Kebijakan Publik FISIP UMRAH berkantor di Jalan Raya Dompok Tanjungpinang 29125. Contact Person 0821-7274-2625, email; dosengo_blog@yahoo.com,

Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Ketua,

A.SURADJI MUHAMMAD, M.Si